

JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 2	Page 125-223	November 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	---------------	----------------



JGLP

Journal of Governance and Local Politics

125-135	Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang? Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149	Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih
150-164	Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu
165-175	Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi
176-187	Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati
188-198	Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad
199-210	Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule
211-223	Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 Siti Fatimah, Anirwan

Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

Lukas Alberto Ndoa¹, Poni Sukaesih Kurniati²

Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia.

Corresponding Author: lukasalbertondoa@gmail.com

Keyword:

Implementation
E-Government
Waste Management
Kang Pisman Mobile
Application

Abstract: *The Kang Pisman application is a waste bank application managed by the Mandalajati District Government in carrying out policies related to waste management. This study aims to determine the extent of the implementation of E-Government Policy Implementation in waste management through the Kang Pisman Mobile Application which is an innovation in dealing with waste problems in the Mandalajati sub-district, Bandung City. The method used in this research is a qualitative approach with a descriptive methodology. library research, field studies, including data collection observations, interviews, and documentation, through this research collect data. The information mechanism for the public using the Kang Pisman Mobile application is a purposive sampling technique. The results of this study indicate that the implementation of the E-Government Policy in Waste Management through the Reduce, Separate, Utilize Waste (Kang Pisman) Mobile Application has been going well, namely carrying out the policy of Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2018 in waste management, however, the implementation of this policy not all of them are right on target seeing that the public does not know this policy this is due to human resources, budget resources, transmission and consistency among organizations, cognition (understanding) of the apparatus, response, and intensity in implementing policies, economic resources and power assessed still not enough.*

Kata Kunci:

Implementasi
E-Government
Pengelolaan Sampah
Aplikasi Kang Pisman
Mobile

Abstrak: Aplikasi Kang Pisman adalah aplikasi bank sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan Mandalajati dalam melakukan kebijakan terkait pengelolaan sampah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah melalui Aplikasi Kang Pisman Mobile yang merupakan sebuah inovasi dalam menangani permasalahan sampah di kecamatan mandalajati Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif. Melalui penelitian kepustakaan, studi lapangan, termasuk pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini mengumpulkan data. mekanisme penentuan informan kepada masyarakat pengguna aplikasi Kang Pisman Mobile adalah teknik *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile sudah berjalan cukup baik yaitu menjalankan aturan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah, Namun, Implementasi kebijakan ini belum seluruhnya tepat sasaran melihat bahwa masyarakat belum mengetahui kebijakan ini hal ini disebabkan dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Transmisi kejelasan dan konsistensi di antara organisasi, kognisi (pemahaman) aparatur, respon, dan intensitas dalam melaksanakan kebijakan, sumber daya ekonomi dan kekuasaan dinilai masih kurang.

PENDAHULUAN

Kota Bandung saat ini sedang mengalami pertumbuhan teknologi dimana perubahan menjadi lebih nyata dari tahun ke tahun atau sesekali. Kemajuan ini harus dilihat dalam konteks fungsinya dalam membantu organisasi pemerintah menjadi lebih efektif, serta sebagai alat untuk mengungguli persaingan dan menawarkan solusi inovatif untuk suatu masalah. Perubahan-perubahan ini penting karena akan muncul setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dikontraskan dengan tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang baru. Akibatnya, setiap orang harus berpartisipasi dalam menemukan cara-cara baru untuk mengatasi masalah.

Tahun 2003 merupakan langkah awal di Indonesia untuk bisa menerapkan kebijakan *Electronic Government (E-Government)*. Melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan ini sifatnya praktis, di mana didalam isinya telah memuat langkah-langkah yang diperlukan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan pengembangan *E-Government* secara nasional yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional. dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut bertujuan agar *E-Government* dapat mendukung pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan upaya menuju keberlanjutan. keberlanjutan harus memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas agar perubahan demi perubahan mulai tercipta.

Gagasan pengelolaan sampah terpadu diterapkan untuk mengurangi limbah pada sumbernya. Ini berarti bahwa limbah yang dihasilkan harus dipulihkan untuk digunakan kembali dan daur ulang, sehingga hanya residu yang dibuang di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Output dari pengolahan yang digunakan sebagai bahan masukan dalam proses atau dikonversi menjadi nilai tambah masukan bagi proses lainnya, memaksimalkan konsumsi sumber daya dan meningkatkan eko-efisiensi (Ngoc dan Schnitzer, 2009).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah, Pemerintah Daerah Kota Bandung membuat kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No 9 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, sebagai petunjuk teknis dan pedoman dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik secara terukur di Kota Bandung. Melalui Peraturan tersebut dibuatkanlah sebuah kebijakan yang dinamakan gerakan "Kang Pisman".

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah berimplikasi pada penyapuan jalan, pengolahan sampah warga ke TPA dari PD Kebersihan yang dibubarkan dan dilebur ke UPT DLH Kota Bandung, dan lain-lain. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandung. Salah satunya Kecamatan Mandalajati dalam penyelenggaraan pengelolaan sampahnya membuat bank sampah yang menggunakan inovasi teknologi aplikasi. Kebijakan yang diterapkan untuk mendukung Inovasi tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 aturan ini tergambarakan melalui Buku Inovasi Bandung *Smart City*. Kecamatan Mandalajati adalah kecamatan percontohan dalam program 100 hari kerja walikota bandung dalam rangka Beberes Bandung yang fokus mengatasi sampah.

Pemerintah Kecamatan Mandalajati mengeluarkan kebijakan terkait dengan aplikasi lewat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bank Sampah Mandiri Kecamatan Mandalajati Tahun 2020. Melakukan input data kegiatan Bank Sampah Mandiri meliputi pula Bank Sampah Unit (Kelurahan) ke dalam Sistem Aplikasi IBS (*Intergrate Bank System*) yang merupakan Aplikasi Kang Pisman Mobile. Aplikasi Kang Pisman Mobile adalah mekanisme yang dibuat untuk menyajikan informasi dan data sampah tabungan, dan fitur belanja dan pembayaran PBB, Listrik, Telepon dan Lain-lain.

Aplikasi Kang Pisman Mobile di *launching* pada tanggal 14 Mei 2020. pusat informasi yang tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh masyarakat umum dari *Play Store*, Aplikasi ini untuk mempermudah pengelolaan dan meminimalisir sampah di wilayah sekitar Kota Bandung dan Kecamatan Mandalajati. Pemerintah Kecamatan Mandalajati, Bank Sampah Indonesia, dan *USSI Group* yang juga dikenal dengan USSI (tanpa singkatan) adalah bisnis teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk lembaga keuangan mikro di Indonesia. Mereka Bersama-sama, menciptakan aplikasi Kang Pisman Mobile Sebagai lembaga keuangan mikro dan produk layanan teknologi di Indonesia. *USSI Group* Bekerja sama dengan Bank Sampah Indonesia dan Pemerintah Kecamatan Mandalajati dalam memudahkan pengelolaan dalam mengurangi sampah yang ada di wilayah Kota Bandung dan sebagai aplikasi tabungan keuangan pembayaran dan pembelian sampah yang dijual menjadi lebih sederhana. Masyarakat umum cukup menggunakan ponsel yang bisa didapatkan dari *Google Play Store* untuk mengaksesnya. Selain itu, situs web untuk program ini dapat diakses melalui monitoring, *Mini Core*, *Smart Card*, Aplikasi Bank Sampah Indonesia, dengan adanya aplikasi Kang Pisman Mobile memudahkan masyarakat dalam mengelola dan mengurangi sampah yang ada di wilayah rumah maupun tempat bekerja. Sebelum melakukan penelitian ini, Peneliti merujuk ke beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema tentang kebijakan penggunaan aplikasi pemerintahan, yang menjadi bahan referensi bagi peneliti saat ini.

Pertama, Dewi Kurniasih, Tatik Fidowaty, dan Poni Sukaesih (2013) tentang pengaruh implementasi kebijakan *E-Government* terhadap kinerja aparatur kota Cimahi pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa penerapan *E-Government* signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. Implementasi kebijakan *E-Government* memberikan pengaruh sebesar 54,85% terhadap perubahan kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi. Meskipun tidak terlalu besar, namun implementasi kebijakan *E-Government* merupakan salah satu faktor yang dominan dalam menentukan perubahan kinerja aparatur pemerintah di Kota Cimahi.

Diah Rachma Aprianty (2016) Penerapan Kebijakan *E-Government* Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Di dalam proses pelaksanaan kebijakan *E-Government* di Kecamatan Sambutan Hambatan termasuk kurangnya sumber daya, kurangnya pendidikan kebijakan publik, dan komunikasi yang buruk antara pimpinan dan staf.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Sansprayada, A., & Mariskhana, K. (2020). Implementasi Aplikasi Bank Sampah Berbasis Android Studi Kasus Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan. pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Di dalam proses Aplikasi tersebut dibangun dengan antarmuka pengguna yang dapat dikenali untuk membuatnya lebih mudah digunakan oleh pengguna. Petugas Bank Sampah Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan dapat lebih nyaman dalam melakukan setiap pelayanan dengan memanfaatkan aplikasi ini. Pelanggan dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi di mana saja dengan memanfaatkan aplikasi ini di *smartphone Android* mereka. Nasabah dapat dengan cepat mengecek saldo tabungannya menggunakan aplikasi ini di *smartphone Android*nya. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan untuk para pengepul dalam melakukan pengecekan stok sampah yang tersedia di Bank Sampah Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan dan melakukan transaksi pengambilan sampah di Bank Sampah Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan. Aplikasi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Sangat penting untuk meningkatkan ini aplikasi agar lebih baik.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Wiwiet Hertiarani (2016) Implementasi Kebijakan E-Samsat Di Jawa Barat, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan E-Samsat, tidak memahami alur proses dan tata cara pembayaran menggunakan E-Samsat, karena kurang mendapatkan informasi secara menyeluruh dan tuntas, format dan media sosialisasi yang telah dibuat terputus dan kurang tersebar, Tidak semua masyarakat pemilik ranmor berpelat Jawa Barat dan calon pengguna kebijakan ini, memiliki rekening di Bank BJB, Adanya proses pencocokan NIK pemilik ranmor dengan NIK data nasabah pada server Bank BJB. Data NIK harus persis sama. Serta alur proses kebijakan ini masih ditemukan kendala dengan server dan kendala akses jaringan untuk kode bayar yang memaksa pengguna layanan untuk melakukan sejumlah aktifitas dan melakukan antrian, Perlu ditindak-

lanjutnya suatu aturan agar sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, berkelanjutan dan dapat dinikmati dan diakses dengan mudah oleh calon pengguna layanan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Rino Adibowo, Sylvia Octa Putri (2016) Penerapan *E-Government* Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa aplikasi tersebut belum memiliki page khusus dalam portal, Belum tersedianya pilihan multi bahasa, belum terlihat hasil dan manfaat dari kerjasama *sister city* antara Pemerintah Kota Bandung dengan kota lainnya yang dapat diakses oleh publik didalam portal bandung.go.id.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Indra Gunawan Wibiksana (2020) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Di Kota Bandung, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Penguatan Kapasitas Individu, Penguatan kapasitas kelembagaan, Penguatan kapasitas jejaring belum terlaksana secara menyeluruh dan belum optimal di program Kang Pisman.

Beberapa hasil penelitian dari studi sebelumnya, yang sudah dikemukakan di atas, bahwa sumber daya yang dibutuhkan harus berkualitas yang sudah dilatih melalui pelatihan bertahap, serta pengelolaan teknologi informasi, khususnya di bidang aplikasi, semuanya sejalan dengan gagasan *E-Government*, Hasilnya, sebuah aplikasi dapat dikelola seefektif mungkin. Tujuan utama Program Kang Pisman yang masih belum ideal adalah untuk membangun penyediaan informasi yang besar dan efektif dengan menerapkan kebijakan terkait penggunaan aplikasi berbasis *E-Government*. Dari pemaparan hasil penelitian di atas, terlihat adanya kesejajaran dan pertentangan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti. dalam hal persamaan penelitian ini terdapat pada hal implementasi Kebijakan *E-Government* dan Program Kang Pisman, dimana bisa diketahui Implementasi kebijakan *E-Government* beberapa masih ada yang baru dan ada beberapa yang masih berjalan sudah lama di daerah tersebut yang berfokus pada aplikasi yang digunakan sebagai pelayanan publik terhadap masyarakat dan Program Kang Pisman program bergerak dalam bidang lingkungan untuk pengelolaan sampah. Sedangkan dalam hal perbedaan terdapat pada obyek penelitian, pada penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan *E-Government* dan Pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan *E-Government* Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat"

METODE PENELITIAN

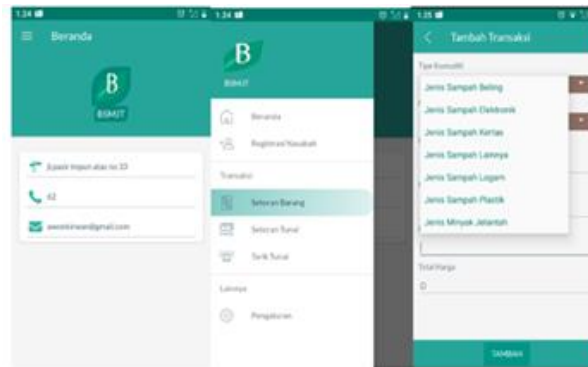
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, penelitian kualitatif mengacu pada "konteks sosial" atau situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen: tempat, aktor, dan aktivitas yang berkolaborasi (Sugiyono, 2007). pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi tujuan atau objek penelitian yang dibatasi untuk menggali lebih dalam data yang dikumpulkan dan mencegah objek penelitian menjadi lebih luas

Penelitian ini menjelaskan mengenai fakta-fakta yang terjadi mengenai Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Sampah di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memeriksa informasi tentang topik terkait Implementasi kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Sampah di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung sehingga teori dasar yang telah diteliti dapat didukung oleh data yang telah terkumpul. Peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan setelah mendapatkan gambaran yang luas tentang objek tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Aplikasi Kang Pisman Mobile

Aplikasi Kang Pisman *Mobile* dikembangkan pemerintah kecamatan Mandalajati, Bank Sampah Indonesia dan USSI Group, USSI Group atau hanya USSI (tanpa Singkatan), adalah bisnis teknologi informasi Indonesia yang menciptakan perangkat lunak untuk lembaga keuangan mikro. Sebagai lembaga keuangan mikro dan produk layanan teknologi di Indonesia *USSI Group* Bekerja sama dengan Bank Sampah Indonesia dan Pemerintah Kecamatan Mandalajati dalam memudahkan pengelolaan dalam mengurangi sampah yang ada di wilayah Kota Bandung dan sebagai aplikasi tabungan keuangan pembayaran dan pembelian sampah yang dijual menjadi lebih sederhana. Masyarakat umum cukup menggunakan *ponsel* yang bisa didapatkan dari *Google Play Store* untuk mengaksesnya. Program ini juga ditawarkan melalui *website Monitoring, Mini Core, Smart Card*, Aplikasi Bank Sampah Indonesia, dengan adanya aplikasi *Kang Pisman Mobile* memudahkan masyarakat dalam mengelola dan mengurangi sampah yang ada di wilayah rumah maupun tempat bekerja. Nasabah bank sampah diwajibkan memilah sampah dari rumah masing-masing. Setiap Sampah yang sudah dipilah setelah ditimbang oleh petugas bank sampah mandiri, bank sampah tersebut melakukan penginputan melalui aplikasi bank sampah mandiri aplikasi khusus pegawai bank sampah mandiri untuk penginputan data-data nasabah baik pendaftaran nasabah baru maupun penginputan barang-barang yang telah dipilah oleh nasabah bank sampah mandiri, Seperti gambar dibawah ini:



Gambar. 1

Aplikasi Bank Sampah Indonesia

Sumber: Hasil data sekunder olahan peneliti, 2022

Aplikasi *Kang Pisman Mobile* Terkoneksi dengan aplikasi petugas bank sampah mandiri dan memiliki tampilan warna yang cukup menarik yaitu biru muda dan terdapat seorang tokoh memakai baju adat sunda dan iket kepala dan tangannya membentuk angka Jari jempol dan telunjuk yang menyatu sementara tiga jari lainnya tetap tegak mengajak melakukan Menerapkan 3R (*reduce, reuse, recycle*) merupakan salah satu cara untuk mengurangi polusi dan menjaga lingkungan. Masyarakat sebagai pengguna aplikasi ini merasa sangat nyaman untuk digunakan. Desain dan animasi ilustratif aplikasi ini membuatnya lebih mudah untuk memahami cara menggunakannya. di bawah ini menunjukkan aplikasi *kang pisman mobile*:



Gambar. 2
Aplikasi Kang Pisman Mobile
Sumber: Hasil data sekunder olahan peneliti, 2022

Kang Pisman Mobile merupakan Salah satu platform layanan produk *Integrated Micro Banking System (IBS e-Channel)* yang memungkinkan pengguna bank keuangan mikro bertransaksi secara elektronik menggunakan ponsel. Aplikasi dapat diperoleh dari *Play Store*, setelah menginstal aplikasi Kang Pisman Mobile dan nasabah membawa hasil memilah sampah dari rumahnya masing-masing, kemudian di setorkan ke kecamatan, nanti berat sampah yang ditimbang akan dihitung, kemudian nasabah mendaftarkan akunnya dengan mengisi kode LKM yang akan diberikan petugas Bank Sampah Indonesia yang ada di kecamatan mandalajati, kemudian pengisian data lewat aplikasi khusus petugas untuk mengisi data pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon yang akan digunakan di aplikasi, alamat rumah dan pekerjaan, setelah itu akan ada kode masuk kemudian kode tersebut akan dikirimkan ke salah satu nomor untuk di registrasi, Setelah itu muncul device id yang akan tertera di aplikasi, kemudian memasukkan kode LKM dan Pin Yang diberikan petugas kemudian kirim, Selanjutnya membuat password setelah itu kembali ke halaman utama untuk login dengan memasukkan password. Aplikasi Kang Pisman Mobile Tersedia Fasilitas untuk transaksi: Cek Saldo Tabungan/Simpanan; Informasi Peminjaman Rekening Tabungan; Informasi Tentang Riwayat Kredit/Pinjaman; Pembayaran: Jastel, PLN Postpaid; Pembelian: Pembelian Pulsa, Pembelian token listrik.

Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kang Pisman Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Program Kang Pisman merupakan program yang menterjemahkan perilaku pengelolaan sampah Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman), yang terdahulu itu namanya 3 R *reuse, reduce, dan recycle*. Yang sekarang itu kang pisman dimana masyarakat di edukasi budaya pengendalian sampah di sumbernya dengan kurangi sampah di sumber dengan kurangi sampah pisahkan sampah dan manfaatkan sampah yang merupakan Pemerintah kota bandung khususnya dalam bidang pengelolaan sampah yaitu salah satu program pengendalian sampah, baik sampah organik maupun anorganik, dimana sampah organik adalah sampah dapur yang biasanya dibuang di tempat sampah, Pengendalian sampah pada sumbernya dengan mengurangi sampah, memisahkan dan memanfaatkan sampah sangat berguna. Hal itu bisa dilihat dari sampah bahan organik yang layak digunakan untuk dijual menjadi saldo *E-Money* di mana berbagai pembayaran dapat dilakukan di Aplikasi Kang Pisman Mobile hal tersebut sangat positif bagi kecakapan masyarakat tentang teknologi informasi.

Pemerintah Kecamatan Mandalajati telah menjalankan apa yang diperintahkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dengan menerapkan kebijakan E-Government di bidang pelayanan. Penerapan E-Government dalam pelayanan masyarakat melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yang dapat mendorong partisipasi dunia usaha, perluasan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan dan daerah otonom,

serta meningkatkan E-Literacy masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah yang layak dan dapat menghasilkan secara ekonomi.

Implementasi kebijakan *E-Government* di Kecamatan Mandalajati berfungsi sebagai sarana penelitian dan pengembangan untuk mengatasi pengelolaan sampah dan memiliki keunggulan di era informasi yang semakin berkembang. Hal ini tidak berfungsi dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator seperti Ukuran dan Tujuan yaitu Kesesuaian Program (kebijakan), Program kebijakan agar terlaksana dengan baik diperlukan kesesuaian kebijakan yang benar-benar mengatur kebijakan tersebut. Pemerintah Kecamatan Mandalajati dalam mengimplementasikan kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu pengelolaan sampah yang menjadi nilai ekonomi di lingkungan masyarakat. dimana kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah harus sesuai membentuk salah satu komponen di dalam aturan kebijakan. Rangkaian tujuan kedua berfokus pada langkah-langkah yang diambil aparaturnya untuk menerapkan kebijakan. Jika dan hanya jika kebijakan tersebut dapat dilaksanakan mengingat keadaan sosial budaya yang ada di tingkat pelaksana kebijakan serta masyarakat, besaran dan tujuan implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya. Ini berarti bahwa suatu kebijakan harus dimodifikasi selama proses pembuatannya untuk memperhitungkan keadaan sosial dan budaya saat ini, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun pada tingkat implementasi. Artinya, baik pada tataran implementasi maupun dalam kaitannya dengan masyarakat, Baik di tingkat pelaksana maupun dalam kaitannya dengan masyarakat, suatu kebijakan harus disesuaikan dengan keadaan sosial budaya. Hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan diatas, ukuran dan tujuan dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat peneliti menilai bahwa berdasarkan Tujuan yaitu kesesuaian Kebijakan (Program) sudah berjalan cukup baik yaitu menjalankan aturan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah, dimana beberapa wilayah kelurahan warga masyarakatnya sudah bisa melakukan pengelolaan sampahnya namun dalam pelaksanaan kebijakan *E-Government* dalam Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Mobile dilihat dari ukuran yaitu ketetapan sasaran peneliti menilai bahwa masih kurang dalam Implementasi kebijakan ini karena belum seluruhnya tepat sasaran melihat bahwa masyarakat belum mengetahui kebijakan ini dan beberapa masyarakat dan aparaturnya tidak memahami Teknologi Informasi seperti aplikasi maupun website Sehingga diperlukan pembuatan kebijakan yang dapat melihat kondisi sosio dan kultur budaya di tingkat para pelaksana kebijakan yaitu Aparatur dan masyarakat.

Sumber daya kebijakan merupakan elemen yang dapat bermanfaat bagi implementasi sehingga diharapkan bisa berjalan sesuai rencana. Sumber daya meliputi, Pertama, sumber daya manusia adalah alat yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan sejalan dengan ketentuan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan serta penyediaan sumber daya yang relevan, selama pelaksanaan program memiliki Kewenangan untuk memastikan bahwa program dapat diarahkan sebagaimana dimaksud dari sumber daya tersebut. Sumber Daya Manusia yang diperlukan merupakan sumber daya yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya untuk memaksimalkan aplikasi dalam pengelolaan sampah. Kedua Sumber daya biaya, yaitu anggaran, Sumber Daya Biaya yang digunakan Untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan dengan baik. Ketiga Sumber daya waktu, merupakan unsur yang di jadikan patokan dalam berjalannya suatu kebijakan. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada pihak terkait dan masyarakat, peneliti melakukan wawancara yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pelaksanaan dari implementasi Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung peneliti menilai bahwa sumber daya manusia dan Sumber Daya Anggaran kurang dalam Implementasi kebijakan *E-Government*.

untuk Pengelolaan bank sampah oleh masyarakat kelurahan yang terpilih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kurangnya pemahaman terhadap sistem atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan Mandalajati, dan kurangnya sumber daya manusia disebabkan tidak adanya semangat sosial di dalam beberapa individu masyarakat membuat Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi kang pisman kurang hal ini dilihat dari beberapa bank sampah yang aktif dalam penggunaan kebijakan aplikasi di wilayahnya. ditambah dengan tidak adanya sumber anggaran di kebijakan ini membuat Tantangan dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah melalui Aplikasi Kang Pisman *Mobile* sangat sulit untuk diharapkan keberhasilannya.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan penetapan suatu kebijakan melalui komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi, yang diklasifikasikan ke dalam Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pengambil keputusan hingga masyarakat, yang sebenarnya akan melakukan implementasi. Penyampaian informasi disini adalah cara aparatur dalam mengkomunikasikan informasi mengenai kebijakan Implementasi kebijakan *E-Government* dalam pengelolaan sampah melalui aplikasi kang pisman *mobile*. Kejelasan, Penyampaian sebuah Informasi kebijakan haruslah memiliki kejelasan maksud dan tujuan dibuatnya sebuah kebijakan peran penting pembuat kebijakan dalam menyampaikan kebijakan yang dibuatnya harus sesuai apa yang tergambaran didalam kebijakan tersebut. Konsistensi, Sebuah kebijakan yang muncul dari suatu proses Konsistensi dari Aparat Pembuat Kebijakan diperlukan karena kebijakan yang dihasilkan dari proses yang berkelanjutan dan rentan terhadap perubahan telah dikembangkan, diterima, diimplementasikan, dan kemudian menerima umpan balik di dalam kegiatan masyarakat. Menurut apa yang ditemukan oleh peneliti di lapangan melalui wawancara yang peneliti lakukan serta pengamatan langsung terhadap individu dan anggota masyarakat yang relevan. Disimpulkan bahwa Transmisi kejelasan dan konsistensi berjalan kurang maksimal dalam komunikasi dan penyampaian informasi. Hal ini dilihat dari hanya beberapa aparatur kewilayahan melakukan penyampaian kebijakan ini kepada warga masyarakatnya, penyampaian informasi oleh pihak kecamatan maupun kelurahan kepada warga masyarakat nya perlu dilakukan berulang kali dan menyeluruh agar warga masyarakat paham betul akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan mandalajati. Ditambah diperlukannya gerakan turun langsung mensosialisasikan dan berkomunikasi secara langsung ke warga masyarakat tanpa ada pergerakan Aparatur kewilayahan dibawahnya dan beberapa yang peduli akan kebijakan ini akan membuat masyarakat kurang mengetahui kebijakan ini yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Mandalajati. Diperlukannya koordinasi dan edukasi yang baik agar tidak terjadinya permasalahan yang muncul dalam proses kebijakan. Komunikasi organisasi adalah proses yang menantang dan kompleks. Maka diperlukan konteks hubungan antar organisasi (atau antar pemerintah) yang diperlukan. dua jenis kegiatan yaitu penegakan atau diperlukannya tindak lanjut karena sangatlah penting. Hal tersebut dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang kecil dan dapat memudahkan dalam proses kemajuan tujuan kebijakan.

Karakteristik agen pelaksana yaitu Sikap setiap aparatur dalam menjalankan kebijakan merupakan ciri-ciri agen pelaksana. Pola pikir ini dapat menjadi pedoman bagi mereka yang mengadopsi kebijakan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat: Pertama, tingkat pendidikan, yaitu tingkat kebijakan pengawasan yang harus dilalui oleh aparatur kebijakan. Kedua, kejujuran, yaitu pola pikir yang harus dimiliki oleh aparatur pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada pihak terkait dan masyarakat, peneliti melakukan wawancara yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Karakteristik Organisasi Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat peneliti menilai bahwa pendidikan cukup bagus dan dalam hal kejujuran aparatur dan petugas bank sampah sudah melakukan di dalam melaksanakan kebijakan.

Menurut Van Metter Kecenderungan pelaksana (implementor) adalah sikap yang dominan dari aparatur kebijakan, yang dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: Pertama Kognisi (pemahaman), yaitu pemahaman aparatur kebijakan terhadap isi kebijakan. Kedua Tanggapan, merupakan kaitannya dengan pemahaman mereka terhadap kebijakan. Ketiga Intensitas tanggapan,

merupakan reaksi pelaksana kebijakan dalam hal pengawasan terhadap pemahaman kebijakan untuk selanjutnya menentukan kekuatan respons kebijakan tersebut. Berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh sikap atau kecenderungan para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada pihak terkait dan masyarakat, peneliti melakukan wawancara yang telah dilakukan berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Sikap Para Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Peneliti berpendapat bahwa masih terdapat permasalahan dengan indikator ini, yaitu kognisi (pemahaman) aparatur, respon, dan intensitas dalam melaksanakan kebijakan, terbukti dari kognisi (pemahaman) sebagian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan instruksi mereka tentang pedoman yang ditetapkan dalam *Kebijakan E-Government* Aplikasi Kang Pisman Mobile untuk Pengelolaan Sampah. Pembuatan aturan yang diterapkan di masyarakat tidak sesuai dengan kebijakan tersebut, terbukti tidak banyaknya warga masyarakat yang mengunduh Aplikasi Kang Pisman Mobile. Agar strategi ini dapat dilaksanakan, pimpinan aparatur harus mengambil tindakan dengan mendukung kemampuan dan keinginan para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan komitmen untuk menginformasikan dan berinteraksi dengan aparatur kewilayahan dan masyarakat.

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu Kondisi pemerintah yang secara signifikan mempengaruhi bagaimana kebijakan diadopsi. Hal ini terlihat dari sumber pertama ekonomi berikut ini yang merupakan hal terpenting dalam sebuah pengimplementasian sebuah kebijakan publik dikarenakan sebagai faktor penggerak tanpa adanya sumber ekonomi akan mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan. Kedua, tanggapan masyarakat adanya keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap kondisi sosial, para pihak dapat bersama sama untuk meningkatkan kebijakan publik yang unggul sesuai dengan tujuan, sasaran, atau masalah yang dihadapi masyarakat yang ingin diselesaikan agar dapat kondisi sosial masyarakat dalam Implementasi Kebijakan dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya. Ketiga, Kekuasaan Pejabat Aparatur dalam Implementasi Kebijakan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang menentukan berjalan baik atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan, sehingga pejabat publik harus membuat kebijakan publik, dengan memperhatikan tujuan dan harus dipertimbangkan bersama dengan pertumbuhan dan kemajuan kehidupan individu. Berdasarkan apa yang ditemukan oleh peneliti di lapangan melalui wawancara dan observasi langsung ke warga masyarakat setempat, dapat dikatakan bahwa, sumber daya ekonomi dan Kekuasaan, Sumber daya ekonomi yaitu anggaran untuk memenuhi kebutuhan kebijakan sangatlah kurang. Hal ini dikarenakan kebijakan yang berkonsentrasi pada isu lingkungan memiliki anggaran yang tidak terencana. Dengan tidak adanya anggaran kebijakan, yang merupakan sumber daya pendukung agar kebijakan dapat berfungsi. Selain itu, kewenangan aparat aparat dinilai masih kurang karena kekuasaan mereka hanya sebatas memberi perintah dan sesekali turun ke lapangan untuk berbicara dengan petugas di sana. Jika kekuasaan mereka hanya sebatas memberi perintah tanpa terjun langsung ke lapangan, maka pimpinan tidak akan mengetahui persoalan-persoalan yang muncul di sana, seperti kebutuhan apa yang mereka miliki.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile sudah berjalan cukup baik yaitu menjalankan aturan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah, Namun, Implementasi kebijakan ini belum seluruhnya tepat sasaran dan kurang, hal ini berdasarkan warga masyarakat belum mengetahui kebijakan ini hal ini disebabkan dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Transmisi kejelasan dan konsistensi di antara organisasi, kognisi (pemahaman) aparatur, respon, dan intensitas dalam melaksanakan kebijakan, sumber daya ekonomi dan Kekuasaan dinilai masih kurang. Dalam hal pendidikan dan kejujuran aparatur petugas bank sampah sudah cukup

bagus. Hal tersebut Membuat Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kang Pisman Mobile sangat sulit untuk diharapkan keberhasilannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bagian ini diberikan kepada penulis sebagai ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Pilipus Tule dan Ibu Theresia Esti Harnani serta kepada banyak orang yang telah membantu peneliti dengan menawarkan bantuan, wawasan, dan rekomendasi yang bermanfaat. sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang diberikan.

REFERENSI

- Anthony, R. N., & Herzlinger, R. E. (1975). *Management control in nonprofit organizations*.
Abdul, K. (2003). *Pengenalan sistem informasi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: alfabeta.
Artiningsih, N. K. A. (2008). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Anderson, James, (1979), *Public Policy Making, (Second Ed), New York : Holt, Renhart and winston, New York*.
Azwar, A. (1990). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Yayasan Mutiara.
Adibowo Sylvia Octa Putri, R. (2017). *Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung*. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM,
Administrasi Publik. (2021). "Konsep Implementasi Kebijakan Publik". Melalui <https://www.ilmuadmpublik.com/2021/07/konsep-implementasi-kebijakan-publik.html> Diakses tanggal (21/07/2022).
Aprianty, D. R. (2016). "Penerapan kebijakan E-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1589-1602.
Burhan, B. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Raja..
Bandungkota.bps. (2021). "Administrasi Penduduk Kecamatan Mandalajati menurut Jenis Kelamin". Melalui <https://bandungkota.bps.go.id/indicator/12/278/1/administrasi-penduduk-kecamatan-mandalajati-menurut-jenis-kelamin.html>. Diakses tanggal (21/07/2022)
Carter, L., & Belanger, F. (2004). *The Influence of Perceived Characteristics of Innovating on e-Government Adoption*. *Electronic Journal of E-government*, 2(1), pp11-20.
Citarumharum.jabarprov. (2022). "Ada Sekolah Kang Pisman, Sarana Edukasi Atasi Sampah". Melalui <https://citarumharum.jabarprov.go.id/ada-sekolah-kang-pisman-sarana-edukasi-atasi-sampah/>. Diakses pada tanggal (9/9/2022).
Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). *Pengelolaan Sampah Edisi Semester I–2010/2011*. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
Djunaedi, A. (2002, October). *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia*. In *Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux*. Fakultas MIPA UGM. Yogyakarta (Vol. 30).
Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. *Congressional Quarterly Press*.
Friedrich, Carl J. (1963). *Man and His Government*. Newyork : McGraw-Hill.
Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World (Vol. 4880)*. Princeton University Press.
Humas Kota Bandung. (2022). "#HJKB212 Atasi Sampah, Yuk Belajar ke Sekolah Kang Pisman". Melalui <https://www.bandung.go.id/news/read/6887/hjkb212-atasi-sampah-yuk-belajar-ke-sekolah-kang-pisman> Diakses pada tanggal (9/9/2022).
Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.

- Hasniati dan Syahrudin, Muhammad Hamzah. (2009). Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis *E-Government (Eservices)* DI MAKASSAR. Universitas Hasanuddin
- Hertiarani, W. (2016). Implementasi Kebijakan E-Samsat di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(3), 419-440.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. Sage.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). *Electronic Government*. Yogyakarta
- Indrajit, Richardus Eko. (2004) *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi)* Yogyakarta
- Indrajit, Richardus Eko. (2004). *E-Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses diberbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi.
- IPCC. (2006) *IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K.* (eds). Japan: IGES.
- Jones. Charles O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: *An Introduction to The Study of Public Policy*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset.
- Karniawati, N., & Rahmadani, R. (2011). Analisis Kebijakan Penerapan EGovernment Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Karniawati, Nia. (2018). E-Government Dalam Pelayanan Perijinan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat.
- Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh implementasi kebijakan *e-government* terhadap kinerja aparatur kota cimahi. *Sosiohumaniora*, 15(1), 6-14.
- kertyawitaradya. (2010). "Tinjauan teoritis implementasi kebijakan model edward iii". Melalui <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/>. Diakses tanggal (21/07/2022)
- Kuswandi, A. (2020). "Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90-113.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Lin, F., Fofanah, S. S., & Liang, D. (2011). "Assessing citizen adoption of e- 90 Government initiatives in Gambia: A validation of the technolo acceptance model in information systems success". *Government Information Quarterly*, 28(2), 271-279. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.09.004>
- Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A. (1983). *Implementation and public policy*. London: Scoot, Foresman and company
- Mulyadi, Deddy, (2015), *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J.. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2009). "Model Implementasi Kebijakan George Edward III". Melalui <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/> Diakses tanggal (21/07/2022)
- Nugroho, Rian. (2003). Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: Media Komputindo.
- Nugroho Riant, (2007), Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Edisi ke-3, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho Riant, (2015). *Policy Making*, PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Yogyakarta
- Ngoc, U. N., & Schnitzer, H. (2009). *Sustainable solutions for solid waste management in Southeast Asian countries. Waste management*, 29(6), 1982-1995
- Nilandari, A. (2006). *Aku Bisa Menghemat Listrik*, Jakarta: Dian Rakyat.

- oeng Muhadjir (2000) , Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin.15
- Oktasari. (2015) . Teori implementasi kebijakan. (Jurnal Universitas Medan Area)
- Open data Jabar. (2021). "Jumlah sampah yang ditangani berdasarkan kabupaten kota di jawa barat". Melalui <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-sampah-yang-ditangani-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat> Diakses tanggal (21/07/2022)
- Sejati, Kuncoro. (2009). Pengolahan Sampah Terpadu. Yogyakarta: Kanisius.
- Shelly, Cashman, Verman (2009, p57). *Discovering Computers*. Jakarta: Salemba Empat.
- SNI 19-3964-(1994) tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.
- Sumarto, Hetifa Sj. (2003). "Inovasi, Partisipasi dan *Good governance*". Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Sudarso, (1985), "Pembuangan Sampah", Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi Pusat", Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan, Surabaya.
- Suharto, Edi. (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Elfabeta.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Sumantri, arif.(2017).Kesehatan Lingkungan; edisi ketiga,Jakarta:Kencana
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *SHARE: Social Work Journal*, 5(1).
- Sansprayada, A., & Mariskhana, K. (2020). "Implementasi Aplikasi Bank Sampah Berbasis Android Studi Kasus Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan". *Jurnal Inovasi Informatika*, 5(1), 24-34.
- Smartcity.bandung. (2022). "E-book". Melalui <https://smartcity.bandung.go.id/ebook>. Diakses pada tanggal (22/07/2022)
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI
- Ussi pgs.(2022). "PT. USSI PINBUK GLOBAL SOLUSI Perusahaan Teknologi Informasi Lembaga Keuangan Mikro". Melalui <https://ussipgs.com/> Diakses tanggal (21/07/2022)
- Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E . (1975), *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework, Journal Administration and Society*.
- Vermaat, Shelly Cashman. (2009). *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Infotek,
- Wibiksana, Indra Gunawan (2020) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan (Kang Pisman) di Kota Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijakan Publik (Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik). Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi.(2007).Kebijakan Publik: Teori & Proses. Yogyakarta: Medi
- Winarno, Budi. (2012). Teori Dan proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media press.
- World Bank, (2002). *New-Economy Sector Study, Electronic Government and Governance: Lesson for Argentina*.
- Yustianto, P. (2006). Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi: Transformasi Menuju e-Government. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi dan Komunikasi untuk Indonesia, 3-4 Mei. Bandung.
- Yuhefizar. (2012). Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan CMS Joomla Edisi Revisi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta